



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : UBADILLAH
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 409011

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	---
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	---
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	87.430.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	131.681.871
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	219.111.871
III. HUTANG	Rp.	201.518.371
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	17.593.500

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOHAMAD REZA
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 718101

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	400.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/144 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	42.000.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.927.753
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	445.927.753
III. HUTANG	Rp.	427.504.735
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	18.423.018

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2024/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)
UNIT KERJA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TULUS SANTOSO
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 960197

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	120.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/25 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	245.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	649.636.610
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.014.636.610
III. HUTANG	Rp.	322.574.850
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	692.061.760

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2024/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)
UNIT KERJA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD HASRUL HASAN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 960561

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 246 m2/246 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 299 m2/299 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/137 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , Rp. 1.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	225.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	116.935.853
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.541.935.853
III. HUTANG	Rp.	646.025.275
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	895.910.578

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2024/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)
UNIT KERJA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I MADE SUNARSA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 960442

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	---
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	27.800.000
1. MOTOR, YAMAHA 2DP-RA A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 27.800.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	32.636.255
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	60.436.255
III. HUTANG	Rp.	236.444.442
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-176.008.187

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2024/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)
UNIT KERJA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALIYAH
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 939381

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , Rp. 1.500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	5.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	208.893.070
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.713.893.070
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.713.893.070

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2024/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)
UNIT KERJA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMIN SHABANA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 960579

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	115.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1300 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	283.504
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	615.283.504
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	615.283.504

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)
UNIT KERJA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EVRI RIZQI MONARSHI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 959928

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	---
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	---
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	20.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.303.445
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	22.803.445

III. HUTANG Rp. 429.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -406.196.555

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)
UNIT KERJA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MIMAH SUSANTI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 822902

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	---
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	---
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	439.404.273
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	439.404.273

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 439.404.273

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : UMRI
2. Jabatan : SEKRETARIS KOMISI
3. NHK : 99021

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.240.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/55 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/21 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/36 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 610.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 42.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX MATIC Tahun 2023, HADIAH Rp. 36.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 42.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 24.930.942

F. HARTA LAINNYA

Rp. 161.000.000

Sub Total

Rp. 1.510.430.942

III. HUTANG

Rp. 61.440.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.448.990.942



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.